



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

**PANGKALPINANG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2020**



PANGKALPINANG

TAHUN 2020



kukm.babelprov.go.id
-kukm@babelprov.go.id-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional tertuang dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Disamping itu dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang akan dijadikan pedoman Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

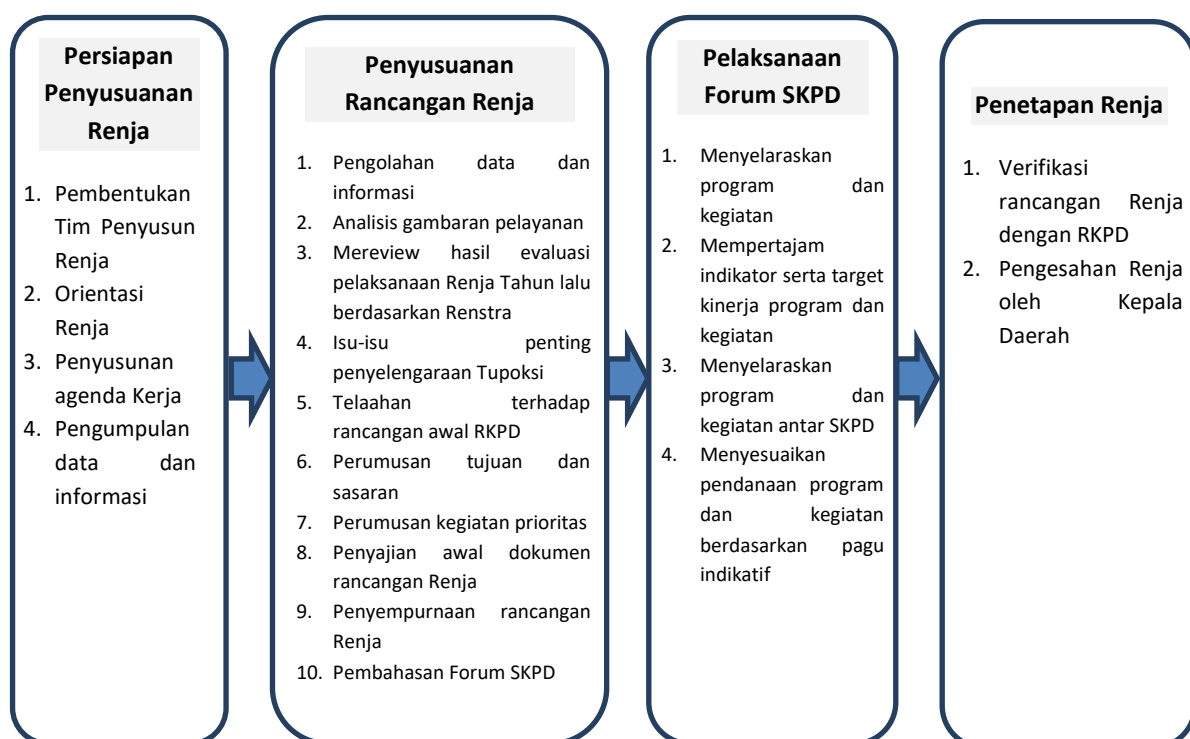
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 27 ayat 1 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun Renja-SKPD yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta prediksi masalah yang akan dihadapi. Selain itu Perubahan Renja ini juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi bahan utama RKPD serta Prakiraan maju anggaran yang dibutuhkan. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya

saing produk unggulan daerah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Perubahan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Perubahan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Kemudian proses selanjutnya adalah penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melalui dua tahap yaitu perumusan rancangan Perubahan Renja dan penyajian rancangan Perubahan Renja, setelah kedua tahapan tersebut dilaksanakan forum SKPD sebagai sarana untuk memfasilitasi penyampaian usulan baik dari Dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rancangan kebijakan yang akan diakomodir ke dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah keseluruhan proses tersebut dilaksanakan, Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kolektif dilakukan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Dasar dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

15. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai dokumen dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

BAB I	Pendahuluan
	Pada bagian ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan daftar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
BAB II	Evaluasi Perubahan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan
	Bab ini memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1 sampai dengan triwulan II Tahun 2020.

BAB III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
	Bab ini berisikan tentang kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
BAB IV	Penutup
	Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja merupakan salah satu acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kebijakan/Program/Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2020, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 6 (enam) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan. Anggaran Belanja tidak Langsung sebesar Rp.6.256.458.185,- dan Belanja Langsung tahun 2020 sebesar Rp.13.229.998.005,-Total Belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp19.486.456.190,- Dari jumlah anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II Tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 6.035.091.624,- atau 36,99 %

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II Tahun anggaran 2020 terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan antara lain :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Kegiatan:

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

- Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi

3. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

- Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha
- Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

- Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil
- Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
- Peningkatan kualitas kewirausahaan

4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM
- Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM
- Peningkatan Mutu Pelayanan Koperasi dan UKM

5. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

- Peningkatan Layanan Usaha Terpadu.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II tahun anggaran 2020 terlaksana dan memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan.

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp 2.916.535.078,- dengan realisasi Rp. 1.283.922.250,- atau 44,00 % hal disebabkan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kegiatan pelayanan terkait dengan pandemi COVID-19.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp 504.050.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0% hal disebabkan Oleh penghapusan anggaran untuk efisiensi dan perubahan (recofusing anggaran) tahun 2020.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp 118.100.000 ,-dengan realisasi Rp. 0,- atau 0% hal disebabkan Oleh penghapusan anggaran untuk efisiensi dan perubahan (recofusing anggaran) tahun 2020.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp.107.515.260,- dengan realisasi Rp. 15.520.950,- atau 25,86 % hal disebabkan efisiensi anggaran dan pergeseran jadwal Rapat.

2. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

- Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi

Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 153.009.930,- dengan realisasi Rp. 3.207.900,- atau 6,34 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona.

- Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
- Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 134.960.280,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0% hal disebabkan penghapusan anggaran untuk efisiensi dan perubahan (recofusing anggaran) tahun 2020.

- Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.

Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 165.818.300,- dengan realisasi Rp. 2.855.000,- atau 2,12 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona

3.. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

- Kegiatan Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha
Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 235.006.740,- dalam perubahan anggaran menjadi Rp.2.510.000,- dengan realisasi Rp. 2.510.000,- atau 1,68 % .
- Kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 134.193.970,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0% hal disebabkan penghapusan anggaran untuk efisiensi dan perubahan (recofusing anggaran) tahun 2020.
- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 369.861.660,- dengan realisasi Rp. 50.250.000,- atau 33,43 % hal disebabkan anggaran untuk bayar Honorarium tenaga Penyuluh (PPKL) sebanyak 4 orang, tapi realisasinya sebanyak 3 orang.

4.. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

- Kegiatan Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil
Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 541.202.447,- dengan realisasi Rp. 63.910.100,- atau 52,42 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona.
- Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 976.782.320,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0% hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona
- Kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan
Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 1.4951.54.500,- dengan realisasi Rp. 332.918.800,- atau 26,28 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona.

5.. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM

Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 1.118.615.000,- dengan realisasi Rp. 113.139.900,- atau 24,37 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona.

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM

Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 732.776.160,- dengan realisasi Rp. 357.290.985,- atau 48,76 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona.

- Peningkatan Mutu Pelayanan Koperasi dan UKM

Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 158.115.380,- dengan realisasi Rp. 3.500.00,- atau 5,96 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona.

- Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasiaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DAK)

Jumlah Pagu triwulan II semula Rp.0,- setelah perubahan anggaran menjadi Sebesar Rp. 2.400.000.000,- dengan realisasi Rp.206.987.600,- atau 8,62 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona.

6. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

- Kegiatan Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

Jumlah Pagu triwulan II Sebesar Rp. 818.300.980,- Peningkatan Layanan Usaha Terpadu dengan realisasi Rp. 148.044.200,- atau 18,39 % hal disebabkan efisiensi anggaran terkait adanya wabah pandemi virus Corona.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Implikasi yang ditimbulkan dari ketidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2020 yaitu realisasi anggaran pada anggaran Perubahan Tahun anggaran 2020.

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

Dalam upaya untuk meminimalisir realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam program/kegiatan, maka di butuhkan upaya sebagai berikut:

- a. Penetapan target berupa output kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran agar target dapat tercapai;
- b. Pelaksanaan program/kegiatan agar tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi target dan anggaran dapat tercapai dan selaras dengan yang ditetapkan dalam DPA;
- c. Pengesahan DPA diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		3.646.200.338	1.283.922.250	44%
		Pelayanan administrasi perkantoran	2.916.535.078	1.283.922.250	44%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	504.050.000	0	0
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	0	0	0
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	118.100.000	0	0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.515.260	15.520.950	25,86%
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0

2	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi				
		Peningkatan kelembagaan dan Perizinan Koperasi	153.009.930	3.207.900	6,34%
		Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	134.960.280	0	0
		Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	165.818.300	2.855.000	2,12%
3	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi				
		Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha	235.006.740	2.510.000	1,68%
		Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	134.193.970	0	0
		Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	369.861.660	50.250.000	33,43%
4	Program Peningkatan Pemberdayaan Usah Kecil				
		Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	541.202.447	63.910.100	52,42%
		Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM	0	0	0
		Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	976.782.320	0	0
		Peningkatan kualitas kewirausahaan	1.495.154.500	332.918.800	26,28%
5	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah				

		Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM	1.118.615.000	113.139.900	24,37%
		Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	732.776.160	357.290.985	48,76%
		Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM	158.115.380	3.500.00	5,96%
6	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM				
		Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	818.300.980	148.044.200	18,39%

Tabel

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan Rutin												
1	01	Bidang Urusan											
1	01	01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Perkantoran	3.646.200.338		3.300.000.000	3.218.763.750	98%					
1	01	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	2.916.535.078		2.420.000.000	2.472.697.350	102%	2.480.000.000		
1	01	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	504.050.000		515.000.000	549.578.400	107%	600.000.000		
1	01	01	03	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)	118.100.000		100.000.000	81.175.000	81%			
1	01	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (%)	107.515.260		110.000.000	49.109.600	45%	150.000.000		
1	01	01	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	3.646.200.338		140.000.000	59.063.400	42%	150.000.000		
1	01	01	06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (Dokumen)			15.000.000	7.140.000	48%			

1	01	02		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		453.788.510		1,500,000,000	614.307.840	41%			
1	01	02	01	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi aktif	153.009.930		930.000.000	330.639.500	36%	1.347.000.000		
1	01	02	02	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi	134.960.280		350.000.000	187.090.400	53%	573.000.000		
1	01	02	03	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi berkualitas	165.818.300		220.000.000	96.577.940	44%	500.000.000		
1	01	03		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		739.062.370		1,150,000,000	605.011.630	53%			
1	01	03	01	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	235.006.740		300.000.000	58.094.550	19%	1.200.000.000		
1	01	03	02	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan	134.193.970		350.000.000	175.700.130	50%	900.000.000		
1	01	03	03	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Persentase peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	369.861.660		500.000.000	371.216.950	74%	835.000.000		
1	01	04		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil		3.013.139.267		21,645,000,000	3.680.045.900	17%			
1	01	04	01	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Persentase pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	541.202.447		1.410.000.000	1.284.876.000	91%	1.688.000.000		
1	01	04	02	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Persentase pertumbuhan pelaku usaha kecil	976.782.320		5.235.000.000	1.832.383.300	35%	6.250.000.000		
1	01	04	03	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Persentase pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan	1.495.154.500			459.594.400				
1	01	04	04	Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM	Pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi	0		15.000.000.000	103.192.200	1%			

1	01	05		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		2.009.506.540		3,535,000,000	2.907.202.350	82%		
1	01	05	01	Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM		1.118.615.000		535.000.000	408.440.150	76%	700.000.000	
1	01	05	02	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)	Persentase SDM Koperasi terlatih	2.400.000.000		3.000.000.000	2.498.762.200	83%	3.000.000.000	
1	01	05	03	Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase SDM Usaha Kecil terlatih	732.776.160						
				Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM		158.115.380						
1	01	06		Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM		818.300.980						
1	01	06	01	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	Pertumbuhan produk parekraf	818.300.980		1.460.000.000	71.830.100	5%	1.585.000.000	

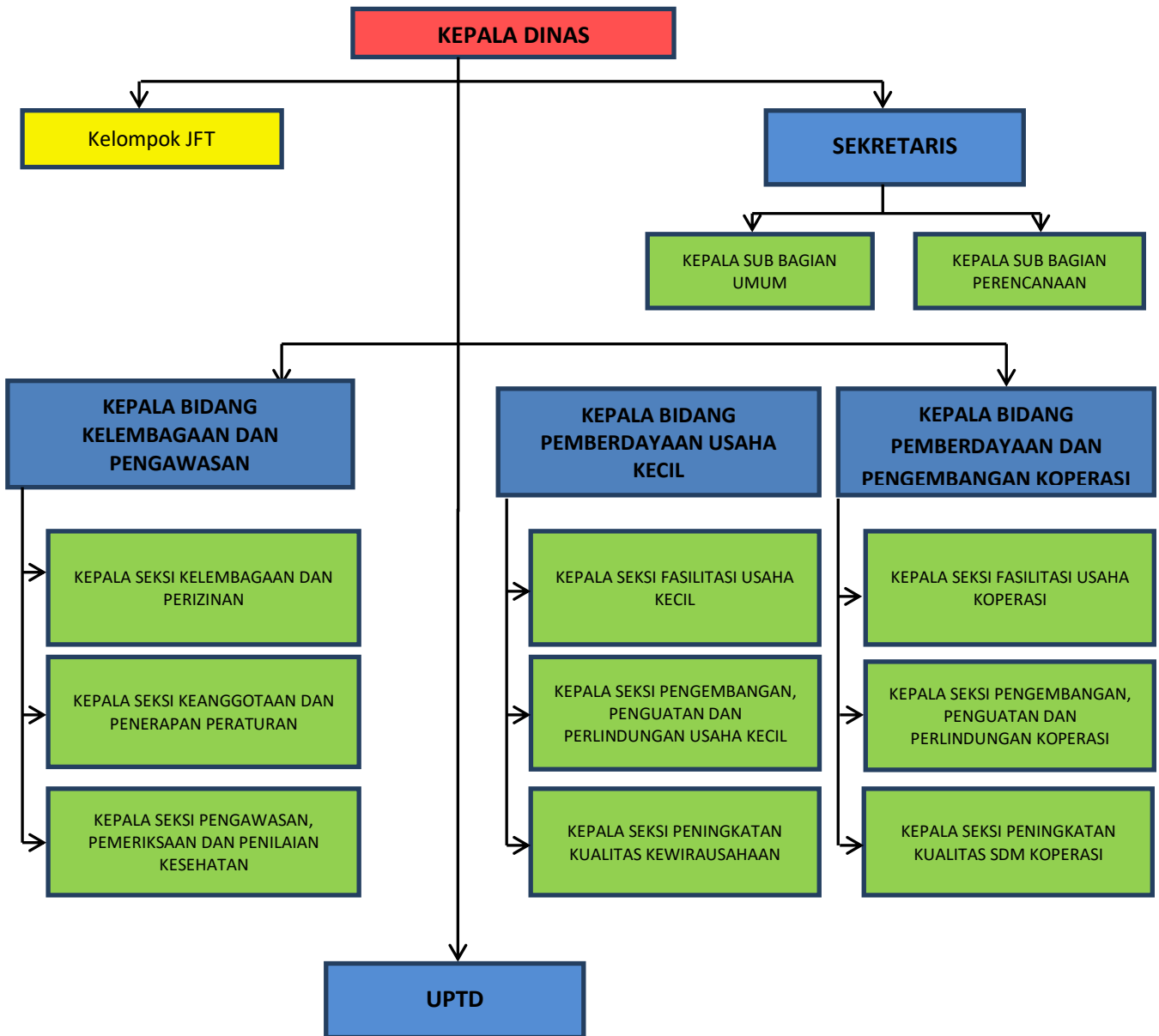
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 3. Seksi Izin Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, membawahkan:
1. Seksi Fasilitas Usaha Kecil;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
1. Subbagian Tata Usaha
 2. Seksi Penyelenggara Pelatihan
 3. Seksi Peningkatan Mutu dan Layanan KUKM
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Pada Triwulan II Tahun 2020 , Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung pegawai sebanyak 50 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	12	-	12
		Gol. III	28	-	28
		Gol.II	10	-	10
		Gol. I	-	-	-
		JUMLAH	50	-	50
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	6	-	6
		S1	30	-	30
		D. IV	-	-	-
		D. III	5	-	5
		D. II	-	-	-
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	9	-	9
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD / sederajat	-	-	-
	JUMLAH	50	-	50	
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- Eselon II	1	-	1
		- Eselon III	5	-	5
		- Eselon IV	14	-	14
		Fungsional Tertentu	5	-	5
		Fungsional Umum (Pelaksana)	25		25
	JUMLAH	50	-	50	

Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Renstra Tahun 2018-2022 terdapat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya skala usaha KUMKM	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase koperasi baru	15,5%
2.		Meningkatnya pertumbuhan KUMKM	- Persentase UKM yang diberdayakan - Persentase Koperasi yang diberdayakan	1,4% 20%
3.		Meningkatnya kualitas SDM KUMKM	- Persentase SDM KUMKM yang bersertifikat - Persentase Penerapan Mutu Pelatihan KUMKM	0,3% 0%

Sumber : Renstra DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKP

Review rancangan Perubahan Renja DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan DKUKM, terlampir pada tabel review terhadap rancangan awal RKP berikut ini:

Tabel T-C.31.
 Review Terhadap Rancangan Perubahan Awal RKP tahun 2020
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Dinas Koperasi dan UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah											
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	81 Orang	2.886.330.147,-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	81 Orang	2.886.330.147,-	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran	81 Orang	103.346.430,-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran	81 Orang	103.346.430,-	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	10 Orang	0,-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	10 Orang	0,-	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.026.350,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	57.026.350,-	
Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi											
	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	7 Kab/ Kota	Jumlah Pembuatan Akta Notaris untuk Koperasi	14 Akta	82.811.800,-	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	7 Kab/ Kota	Jumlah Pembuatan Akta Notaris untuk Koperasi	14 Akta	82.811.800,-	
			Jumlah Peserta mengikuti Diseminasi Pembentukan Koperasi Baru	300 Orang				Jumlah Peserta mengikuti Diseminasi Pembentukan Koperasi Baru	300 Orang		
			Jumlah Peserta yang meningkatnya kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT)	40 Koperasi				Jumlah Peserta yang meningkatnya kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT)	40 Koperasi		
			Jumlah Duta Koperasi Tingkat Provinsi	3 Orang				Jumlah Duta Koperasi Tingkat Provinsi	3 Orang		
			Jumlah Peserta Bimtek Bagi Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS)	30 Koperasi				Jumlah Peserta Bimtek Bagi Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS)	30 Koperasi		
	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	7 Kab/ Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Diseminasi Penambahan Jumlah Anggota Koperasi	100 Orang	0,-	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	7 Kab/ Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Diseminasi Penambahan Jumlah Anggota Koperasi	100 Orang	0	
			Jumlah Peserta Pengkaderan Koperasi	50 Orang				Jumlah Peserta Pengkaderan Koperasi	50 Orang		

			Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus)	100 Orang				Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus)	100 Orang		
Pengawasan, Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan Koperasi	7 Kab/ Kota		Jumlah Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi	3 Koperasi	102.187.300,-	Pengawasan, Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan Koperasi	7 Kab/ Kota	Jumlah Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi	3 Koperasi	102.187.300,-	
			Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi	2 Tokoh Penggerak Koperasi				Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi	2 Tokoh Penggerak Koperasi		
			Jumlah Lokasi yang diawasi	7 Kab/Kota				Jumlah Lokasi yang diawasi	7 Kab/Kota		
			Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	30 Koperasi				Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	30 Koperasi		

Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	7 Kab/ Kota dan Luar Daerah		Jumlah Pameran diikuti	1 Pameran	2.510.000,-	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	7 Kab/ Kota dan Luar Daerah	Jumlah Pameran diikuti	15 Pameran	2.510.000,-	
			Jumlah Koperasi yang melakukan kemitraan	10 Koperasi				Jumlah Koperasi yang melakukan kemitraan	15 Koperasi		
			Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan	35 Koperasi				Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan	35 Koperasi		
Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Pangkalpinang dan Belitung		Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek SPI	60 pengawas/ pengurus koperasi	0,-	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Pangkalpinang	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek SPI	60 pengawas/ pengurus koperasi	0,-	
			Jumlah pengurus koperasi yg mengikuti bimtek pengembangan unit usaha	60 Koperasi				Jumlah pengurus koperasi yg mengikuti bimtek pengembangan unit usaha	60 Koperasi		
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	7 Kab/ Kota		Jumlah Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan; Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapatkan pengetahuan tentang Kewirausahaan Koperasi; Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perkoperasian; Jumlah Peserta Pemasarakatan	40 Orang (3 Kali)	150,325,000	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Barat	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perkoperasian	3 PPKL; 0 pengurus koperasi; 0 Pembina Koperasi/ PPKL; 0 Orang	150,325,000	

Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	7 Kab/ Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pendampingan Perizinan	1000 Naskah	2.673.400.500,-	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	7 Kab/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pendampingan Perizinan	1000 Naskah	2.673.400.500,-	
			Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pendampingan Akses Permodalan	70 Pelaku Usaha				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pendampingan Akses Permodalan	70 Pelaku Usaha		

			Jumlah Pelaku Usaha yang dikutsertakan dalam pameran	50 Pelaku Usaha				Jumlah Pelaku Usaha yang dikutsertakan dalam pameran	50 Pelaku Usaha		
Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	7 Kab/ Kota		Jumlah Peserta Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM	100 Orang	1.040.882.320,-	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	7 Kab/ Kota	Jumlah Peserta Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM	100 Orang	1.040.882.320,-	
			Jumlah Sertifikat Halal	250 Sertifikat Halal				Jumlah Sertifikat Halal	250 Sertifikat Halal		
			Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Kerjasama antar Daerah	7 Pelaku Usaha				Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Kerjasama antar Daerah	7 Pelaku Usaha		
			Jumlah Produk yang difasilitasi untuk barcode produk	30 Produk				Jumlah Produk yang difasilitasi untuk barcode produk	30 Produk		
Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	7 Kab/ Kota		Jumlah wirausaha Pemula yang mengikuti magang	50 Wirausaha Pemula	1.266.703.190,-	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	7 Kab/ Kota	Jumlah wirausaha Pemula yang mengikuti magang	50 Wirausaha Pemula	1.266.703.190,-	
			Jumlah Pelaku Usaha berprestasi tingkat provinsi	5 Pelaku Usaha				Jumlah Pelaku Usaha berprestasi tingkat provinsi	5 Pelaku Usaha		
			Jumlah Peserta Sosialisasi Penumbuhan Wirausaha Baru	1500 Wirausaha Pemula				Jumlah Peserta Sosialisasi Penumbuhan Wirausaha Baru	1500 Wirausaha Pemula		

Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada Pelatihan Perkoperasian dan UMKM	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur yang terlayani selama 12 bulan	19 Orang	371.979.000,-	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada Pelatihan	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur yang terlayani selama 12 bulan	19 Orang	371.979.000,-	
Penyelenggara Pelatihan Perkoperasian dan UKM	Pangkalpinang	Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Perkoperasian Terlatih	210 Orang	628.795.160,-	Penyelenggara Pelatihan Perkoperasian dan UKM	Pangkalpinang	Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Perkoperasian Terlatih	210 Orang	628.795.160,-	
		Jumlah Peserta Pelatihan Bidang UKM Terlatih	360 Orang				Jumlah Peserta Pelatihan Bidang UKM Terlatih	360 Orang		
Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM	Pangkalpinang	Jumlah Sertifikat Audit Surveillance ISO 9001:2015	1 Sertifikat	67.637.000,-	Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi	Pangkalpinang	Jumlah Sertifikat Audit Surveillance ISO 9001:2015	1 Sertifikat	67.637.000,-	
		Jumlah Dokumen Kajian Mutu Pelatihan Perkoperasian	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Kajian Mutu Pelatihan Perkoperasian	1 Dokumen		
Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)				2.400.000.000,-					2.400.000.000,-	

Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	7 Kab/ Kota		Jumlah UKM yang didampingi	50 Pelaku Usaha	805.146.480,-	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	7 Kab/ Kota	Jumlah UKM yang didampingi	50 Pelaku Usaha	805.146.480,-	
			Jumlah Sentra Usaha yang disurvei	3 Sentra Usaha				Jumlah Sentra Usaha yang disurvei	3 Sentra Usaha		
			Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam klinik Usaha Terpadu	150 Pelaku Usaha				Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam klinik Usaha Terpadu	150 Pelaku Usaha		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Koperasi dan UKM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendampingan untuk koperasi nelayan	Pangkalalang			Menghidupkan koperasi untuk mendata kembali para nelayan yang sudah atau belum memiliki kartu nelayan/ kartu kusuka.
2.	Pembinaan Masyarakat untuk Memulai UKM dan Industri berbasis bahan baku lokal	Desa Pangkalalang Tanjung pandan			Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha/UMKM

3.	Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha/UMKM	Pangkal Balam Pangkalpinang			Penyuluhan-penyuluhan mengenai lapangan untuk melakukan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha/UMKM
4.	Bantuan Usaha Kecil dan Mikro	Sripemandang Sungailiat			Masyarakat sripemandang meminta bantuan pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap home industri atau usaha rumahan secara bergulir atau modal berupa pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat yang berfungsi untuk menopang ekonomi keluarga
5.	Sosialisasi Pengembangan UMKM dan Gallery UKM	Kota Pangkalpinang - Selidung			Pemerintah agar melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah mengenai bantuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Masyarakat juga Mengharapkan agar kelompok Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan bantuan serta di sediakan Gallery UMKM untuk ibu rumah tangga dan masyarakat.
6.	Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Belitung			
7.	Kegiatan Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Pemasaran	Kab. Belitung	Jumlah Pelayanan pada Usaha Mikro		
8.	Motivasi Wirausaha dan inventarisasi wirausaha baru	Kab. Bangka	Meningkatkan produktivitas wirausaha yang sudah berjalan maupun yang baru	Meningkatnya 40 UMKM yang baru untuk berwirausaha.	
9.	Pendidikan/pelatihan vokasional pembuatan pakan ikan dari cangkang kulit kepiting dan kulit udang	Kab. Bangka	Meningkatkan produktifitas dan menambah penghasilan ekonomi warga sekitar	40 orang peserta di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat yang mampu memanfaatkan limbah cangkang kepiting dan kulit Udang	
10.	Diklat Manajemen Pengelolaan Usaha	Kab. Bangka	Pelaku usaha bisa mengetahui strategi	Terlatihnya 40 UMKM yang handal dalam berusaha	
11.	Diklat Kemasan Produk	Kab. Bangka	Meningkatnya kualitas produk		

12.	Diklat Pembukuan Online Bagi UMKM	Kab. Bangka	Meningkatnya SDM pelaku usaha dalam pembukuan usahanya.	Terealisasinya pembukuan yang baik bagi pelaku usaha.	
13.	Diklat Promosi/Pemasaran Online	Kab. Bangka	Memperluas jaringan pasar, promosi produk UMKM.	Tersedianya wadah promosi/pemasaran produk UMKM secara online.	
14.	Pendampingan Pinjaman Modal KUMKM ke Bank.	Kab. Bangka	Sebagai informasi untuk mendapatkan pinjaman modal usaha	Koperasi dan UMKM yang mendapat pinjaman modal.	
15.	Bimtek Perkoperasian Bagi pembina Koperasi	Kab. Belitung Timur	Pembina dan PPKL yang memahami Peraturan perkoperasian	10 Pembina	
16.	Pelatihan Kemasan Produk UKM	Kab. Belitung Timur	Produk UKM yang memiliki kemasan yang baik	30 Orang	
17.	Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UKM	Kab. Belitung Timur	UKM yang memahami manajemen Keuangan	30 Orang	
18.	Pelatihan Vocational	Kab. Belitung Timur	UKM yang mengikuti pelatihan dengan memanfaatkan sumber daya lokal	30 Orang	
19.	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha	Kota Pangkalpinang	Jumlah Penerbitan IUMK	350 IUMK	
20.	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan RAT Koperasi	Kota Pangkalpinang	Jumlah Pengurus Koperasi yang terlatih	40 Orang	
21.	Bimtek Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Kota Pangkalpinang	Jumlah Pengurus Koperasi yang terlatih	40 Orang	
22.	Bimtek Perkoperasian Bagi pembina Koperasi	Kab. Bangka Tengah		10 Pembina	
23.	Pelatihan Kemasan Produk UKM	Kab. Bangka Tengah		30 Orang	
24.	Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UKM	Kab. Bangka Tengah		30 Orang	
25.	Pelatihan Vocational	Kab. Bangka Tengah		30 Orang	
26.	Pengadaan Peralatan Keterampilan Usaha Mikro	Kab. Bangka Selatan	Tersedianya Peralatan keterampilan bagi Pelaku usaha Mikro	- 20 Vacum Sealer - 50 Alat Pemotong kemplang - 50 Handsealer	
27.	Pelatihan Kewirausahaan (Desain Kemasan) bagi Pelaku saha Mikro	Kab. Bangka Selatan	Adanya Pelaku Usaha yang dilatih tentang pembuatan desain kemasan	30 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menganut prinsip *money follows program* dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terakhir dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan Perubahan Rencan Rancangan Awal ini disusun Rancangan RKP 2020 mengangkat tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Program kegiatan Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah apabila dikaitkan dengan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN) adalah:

- Prioritas Nasional (PN): Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
- Program Prioritas (PP): Peningkatan nilai tambah jasa produktif

- Kegiatan Prioritas (KP): Pengembangan kemitraan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
- Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang disentuh adalah: perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas usaha, penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan, penguatan ekosistem (regulasi, infrastruktur, investasi, & HAKI), pelaksanaan diklat vokasi, peningkatan promosi dan advokasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, yaitu **"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"** dan Misi Pertama Kepala Daerah yaitu *Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah*, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni *meningkatkan pertumbuhan ekonomi*, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: **"Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM"**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya "meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM" guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, secara spesifik menjabarkan langkah-langkah pencapaian tujuan menjadi beberapa opsi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil;
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan
5. Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM

Secara lebih detail sasaran dari tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dari peningkatan kualitas SDM KUMKM terlatih adalah:
 - a. Meningkatkan jumlah SDM koperasi yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata sebesar 10,32%;
 - b. Meningkatkan jumlah SDM usaha kecil yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata dan sektor lain-lain sebesar 1,07%.
2. Sasaran dari pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Koperasi aktif pada kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu, Minapolitan Lepar Pongok, Etalase Perikanan Selat Nasik dan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata sebesar 15,5 %;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan jumlah kelembagaan koperasi pendukung pariwisata, koperasi sektor pertanian khususnya karet, lada dan sapi serta sektor kelautan dan perikanan sebesar 12,7 %;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan jumlah koperasi berkualitas pada bidang kelautan dan perikanan, sektor pariwisata dan sektor pertanian sebesar 6,6 %.
3. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi :
 - a. Meningkatkan volume usaha koperasi pada sektor pariwisata, koperasi pertanian, lada dan sapi, serta sektor kelautan dan perikanan sebesar 1%;
 - b. Meningkatkan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan sebesar 4%;
dan
 - c. Meningkatkan investasi koperasi sektor pariwisata sebesar 7%.
4. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan usaha kecil adalah:
 - a. Meningkatkan produk usaha kecil yang tersertifikasi pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata sebesar 540%;
 - b. Meningkatkan produk usaha kecil yang dikembangkan sebesar 8%;
 - c. Meningkatkan pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan sebesar 6%;
 - d. Meningkatkan volume usaha pelaku usaha kecil sebesar 15%; dan
 - e. Meningkatkan jumlah wirausaha baru sebesar 15%.
5. Sasaran dari peningkatan kinerja pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUKM adalah meningkatkan pertumbuhan produk parekraf sebesar 10% pertahun dan

survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM.

Hubungan antara visi-misi Kepala Daerah dan tujuan-sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi-Misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Beserta Target Pada Renja Tahun 2020

Visi RPJMD	Misi RPJMD	RPJMD		RENSTRA		Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>	Misi 1: Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi subsektor pertanian, peternakan dan perkebunan 2. Meningkatkan produksi sub sektor perikanan 3. Meningkatkan pengembangan pembangunan pariwisata 4. Meningkatkan produksi sektor pertambangan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis industry 6. Menurunnya angka Pengangguran 	Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil	- SDM koperasi - SDM Usaha kecil	- Persentase SDM koperasi terlatih - Persentase SDM Usaha kecil terlatih	10,3 1.07
				Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi	- Koperasi binaan provinsi - Kelompok strategis - Koperasi aktif	- Persentase Peningkatan koperasi aktif - Persentase Pertumbuhan kelembagaan koperasi - Peningkatan koperasi berkualitas	15,5 12,7 6,6
				Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi	- Volume usaha koperasi - Investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan - Investasi koperasi sektor pariwisata	- Persentase Peningkatan volume usaha koperasi - Persentase Peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan - Persentase Peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	1 4 7
				Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil	- Produk usaha kecil - Volume usaha kecil - Pelaku usaha kecil	- Persentase Pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi - Persentase Pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan - Persentase Pertumbuhan volume usaha kecil - Persentase Pertumbuhan pelaku usaha kecil	540 8 15 15
				Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	- Produk parekraf - Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM	- Persentase Pertumbuhan produk parekraf - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM	10 92

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sasaran utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil, meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM. Kelima sasaran ini didukung oleh 6 program yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan dan beberapa pekerjaan. Outcome program yang direncanakan merupakan target yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2020 terdapat 6 (enam) Program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program teknis dengan uraian kegiatan secara rinci yaitu:

3. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
- 2) Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
- 3) Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

5. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha
- 2) Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- 3) Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

6. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

Kegiatan:

- 1) Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil
 - 2) Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
 - 3) Peningkatan kualitas kewirausahaan
7. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah Pada Pelatihan Koperasi dan UMKM
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM
 - 3) Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)
8. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 01	Bidang Urusan								
1 01 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Perkantoran								
1 01 01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	Pangkalpinang	81 Orang	2.886.330.147,-	APBD		81 Orang	
1 01 01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran	Pangkalpinang	81 Orang	103.346.430,-	APBD		81 Orang	
1 01 01 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang ditingkatkan kemampuannya	Luar daerah	10 Orang	0	APBD		2 Dokumen	

1	01	01	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	Pangkalpinang	57.026.350,-	APBD		81 Orang	5
1	01	02	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi									
1	01	02	01	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah Pembuatan Akta Notaris untuk Koperasi	7 Kab/ Kota	14 Akta	82.811.800,-	APBD		14 Akta	
					Jumlah Peserta mengikuti Diseminasi Pembentukan Koperasi Baru		300 Orang				300 Orang	
					Jumlah Peserta yang meningkatnya kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT)		40 Koperasi				40 Koperasi	
					Jumlah Duta Koperasi Tingkat Provinsi		3 Orang				3 Orang	
					Jumlah Peserta Bimtek Bagi Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS)		30 Koperasi				30 Koperasi	
1	01	02	02	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	Jumlah Peserta yang mengikuti Diseminasi Penambahan Jumlah Anggota Koperasi	7 Kab/ Kota	100 Orang	0,-	APBD		100 Orang	
					Jumlah Peserta Pengkaderan Koperasi		50 Orang				50 Orang	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Penerapan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (Persus)		100 Orang				100 Orang	
1	01	02	03	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi	7 Kab/kota	3 Koperasi	102.187.300,-	APBD		3 Koperasi	
					Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi		2 Tokoh Penggerak Koperasi				2 Tokoh Penggerak Koperasi	
					Jumlah Lokasi yang diawasi		7 Kab/Kota				7 Kab/Kota	
					Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya		30 Koperasi				30 Koperasi	

1 01 03 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi											
1	01	03	01	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	Jumlah Pameran diikuti	7 Kab/ Kota dan Luar Daerah	1 Pameran	2.510.000	APBD		1 Pameran
					Jumlah Koperasi yang melakukan kemitraan		10 Koperasi				10 Koperasi
					Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan		35 Koperasi				35 Koperasi
1	01	03	02	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek SPI	Pangkalpinang	60 pengawas/ pengurus koperasi	0,-	APBD		60 pengawas/ pengurus koperasi
					Jumlah pengurus koperasi yg mengikuti bimtek pengembangan unit usaha		60 Koperasi				60 Koperasi
1	01	03	03	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perkoperasian	7 Kab/ Kota	40 Orang (3 Kali)	150.325.000,-	APBD		40 Orang (3 Kali)
					Jumlah Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan		13 PPKL				13 PPKL
					Jumlah Peserta Pemasarakatan Koperasi		150 Orang				150 Orang
1 01 04 Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil											
1	01	04	01	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pendampingan Perizinan	7 Kab/ Kota, Luar Daerah	1000 Naskah	2.673.400.500,-	APBD		1000 Naskah
					Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pendampingan Akses Permodalan		70 Pelaku Usaha				70 Pelaku Usaha
					Jumlah Pelaku Usaha yang dikutsertakan dalam pameran		50 Pelaku Usaha				50 Pelaku Usaha
1	01	04	02	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Jumlah Peserta Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM	7 Kab/ Kota, Luar Daerah	100 Orang	1.040882.320,-	APBD		100 Orang
					Jumlah Sertifikat Halal		250 Sertifikat Halal				250 Sertifikat Halal
					Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Kerjasama antar Daerah		7 Pelaku Usaha				7 Pelaku Usaha
					Jumlah Produk yang difasilitasi untuk barcode produk		30 Produk				30 Produk

1	01	04	03	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Jumlah wirausaha Pemula yang	7 Kab/ Kota	50 Wirausaha Pemula	1.266.703.190,-	APBD		50 Wirausaha Pemula	
					Jumlah Pelaku Usaha berprestasi		5 Pelaku Usaha				5 Pelaku Usaha	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Penumbuhan Wirausaha Baru		1500 Wirausaha Pemula				1500 Wirausaha Pemula	
1	01	05		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah								
1	01	05	01	Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Aparatur yang terlayani selama 12 bulan	Pangkalpinang	19 Orang	371.979.000,-	APBD		19 Orang	
1	01	05	14	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Perkoperasian Terlatih	Pangkalpinang	35 Orang	628.795.169,-	APBD		35 Orang	
					Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Usaha Kecil yang Terlatih	Pangkalpinang	120 Orang				120 Orang	
1	01	05	02	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)	Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Perkoperasian Terlatih	Pangkalpinang	210 Orang	2.400.000.000,-	APBN		210 Orang	
					Jumlah Peserta Pelatihan Bidang UKM Terlatih		360 Orang				360 Orang	
1	01	05	03	Program Peningkatan Mutu Pelatihan koperasi dan UKM	Jumlah Sertifikat Audit Surveillance ISO 9001:2015	Pangkalpinang	1 Sertifikat	67.637.000,-	APBD		1 Sertifikat	
					Jumlah Dokumen Kajian Mutu Pelatihan Perkoperasian dan UMKM		1 Dokumen				1 Dokumen	
1	01	06		Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM								
1	01	06	01	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	Jumlah UKM yang didampingi	7 Kab/ Kota	50 Pelaku Usaha	894.927.000	APBD		50 Pelaku Usaha	
					Jumlah Sentra Usaha yang disurvei		3 Sentra Usaha				3 Sentra Usaha	
					Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam klinik usahaterpadu		150 Pelaku Usaha				150 Pelaku Usaha	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Pada tahun 2020 tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas" dengan 5 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Pengembangan pembangunan agropolitan;
2. Pengembangan pariwisata;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat;
4. Pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan; dan
5. Pembangunan demokrasi.

Dari kelima prioritas pembangunan daerah ini, ada 3 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu pengembangan pembangunan agropolitan, pengembangan pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis baik dengan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 secara efektif dan efisien. Selain itu Perubahan Renja ini dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2020.

Untuk mendukung realisasi 3 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah tersebut diatas pada tahun anggaran 2020, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki 5 program prioritas yaitu:

1. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
2. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil;
4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan

5. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM.

Kelima program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 triwulan II;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan yang harus dicapai;
5. Memperhatikan keberlanjutan Program (*sustainable development*) yang terdapat pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan Pengendalian dan evaluasi secara konsisten setiap triwulan tahun berjalan terhadap Rencana Kerja terkait kegiatan, target kinerja, anggaran dan permasalahan yang dihadapi untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Pangkalpinang, Agustus 2020

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001

